



**Aksi Iklim Inklusif dan Kolaboratif untuk Penguatan
Strategi Pembangunan Jangka Panjang:
Kepemimpinan Generasi Muda dan Kontribusi Aktor
Non Pemerintah**



#TimeforActionIndonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
- LAODE MUHAMMAD SYARIF	6
- NADIA HADAD	10
KEPEMIMPINAN MASYARAKAT	14
- SELFY SUTRIANI	15
- RAMLAH	17
KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH	19
- PROF NELSON POMALINGO	20
KEPEMIMPINAN SWASTA	21
- HANNA KERAF	22
KEPEMIMPINAN GENERASI PENERUS	24
KISAH - KISAH DARI KAWASAN PEDESAAN	
- HIASINTUS RESTU KRISNANDA	25
KISAH - KISAH DARI KAWASAN PERKOTAAN/URBAN	
- SYAHARANI	26
MODERATOR	
- EKA MELISA	27

PENGANTAR

Kolaborasi dan kontribusi multipihak adalah pesan kunci dalam strategi dan aksi menghadapi perubahan iklim. Tanpa keterlibatan multipihak, tidak ada jaminan terlaksananya tujuan jangka panjang pembangunan berkelanjutan, rendah emisi, dan berketahanan iklim. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, lembaga filantropi, komunitas, masyarakat adat, swasta, semua elemen harus bergandeng tangan dalam orkestra kolaborasi.

Semangat kolaborasi selaras dengan semangat Perjanjian Paris untuk memastikan kerangka kerja perubahan iklim yang transparan, adil, dan inklusif. Upaya mewujudkan berbagai praktik yang lebih berkelanjutan harus dipandu oleh kebijakan-kebijakan nasional yang lintas sektoral, saling terkait, dan holistik yang secara konsisten membawa perspektif global dan sub-nasional.

Pemangku kepentingan non pemerintah (*NPS - non parties stakeholders*), dalam hal ini, meliputi organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan sekitar, swasta dan akademisi adalah mitra pemerintah sebagai pemangku kepentingan (*PS - parties stakeholders*) dalam mencapai komitmen iklim yang transparan, adil, dan inklusif.

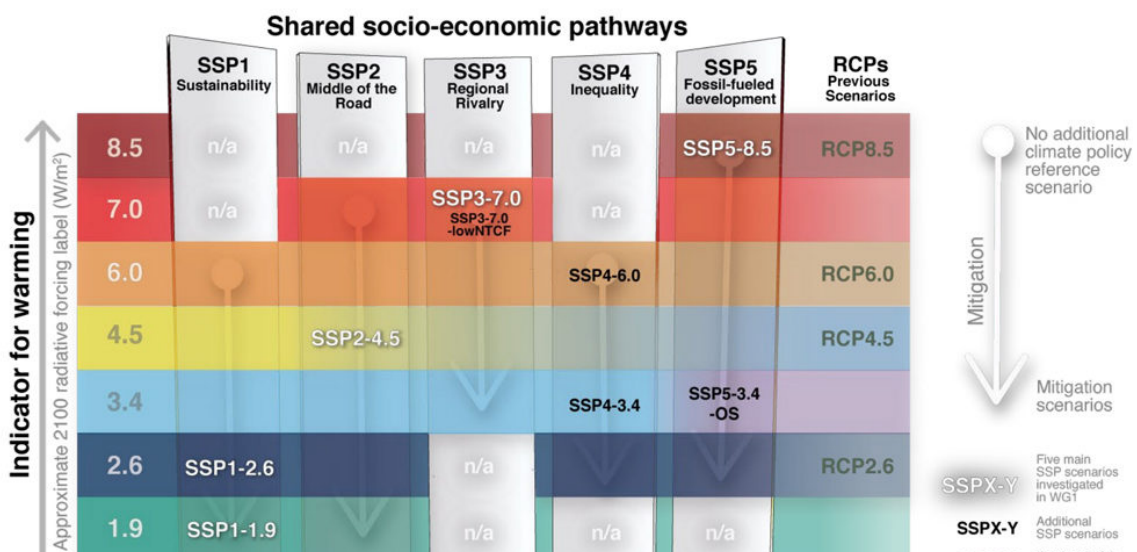
“Alarm peringatan telah berbunyi memekakkan telinga dan bukti kian tak terbantahkan,” begitu kata Antonio Guterres, Sekjen PBB, mengiringi hasil Kelompok Kerja / *Intergovernmental Panel of Climate Change* (IPCC) untuk Laporan Kajian Ke-6 (*The Sixth Assessment Report - AR6*) yang keluar pada bulan Agustus 2021.

Bumi, menurut laporan tersebut, sangat mungkin memanas lebih dari 1,5°C pada tahun 2030 dan melaju hingga 4,4°C pada akhir abad ini jika umat manusia tidak segera bergerak melakukan aksi-aksi iklim yang agresif dan komprehensif. Berbagai dampak dan konsekuensi kenaikan temperatur tersebut sudah nyata dan terjadi saat ini. Perubahan Iklim yang tidak bisa dibalikkan (*Irreversible Changes*) akan menerpa generasi berikut dalam berbagai bentuk peningkatan kejadian bencana dan penurunan pertumbuhan ekonomi. “Ini adalah kode merah buat kemanusiaan,” lanjut Antonio Guterres.

Dalam merespon Perubahan Iklim, Indonesia telah menerbitkan dua dokumen penting di tahun 2021, yakni Pemutakhiran Dokumen Komitmen Indonesia terhadap Upaya Perubahan Iklim (*Updated Nationally Determined Contribution / Updated NDC*) dan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (*Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 / LTS-LCCR 2050*) yang menggarisbawahi strategi Indonesia untuk mencapai Level Nol Emisi (*Net Zero Emission*) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Kedua dokumen ini akan menjadi panduan untuk pelaksanaan pembangunan rendah emisi di Indonesia. Semua pemangku kepentingan, pemerintah dan non-pemerintah, perlu bermitra untuk mengambil tindakan yang akan membawa negara ini menjadi juara dalam transisi menuju masa depan yang berkelanjutan, tangguh, adil, dan rendah emisi.

Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam yang membentang di hutan dan lautan, berpotensi menjadi negara adidaya (*superpower*) iklim. Dengan potensi dan kekayaan alamnya, Indonesia bisa menjadi penyumbang emisi raksasa atau menjadi kontributor utama dalam upaya pengurangan emisi dunia, tergantung pada pilihan ekonomi dan kebijakan politik jangka panjangnya. Kerja keras dan kolaborasi multipihak sangat dibutuhkan agar Indonesia benar-benar bisa mewujudkan diri sebagai negara yang punya dampak positif signifikan bagi agenda iklim dunia.





Bocah dari Meurumba, Sumba Timur





Laode Muhammad Syarif

**Executive Director
Kemitraan**

Dr. Syarif berpengalaman 25 tahun di bidang pendidikan, tata kelola lingkungan, transformasi sosial, hak asasi manusia, anti korupsi, pencegahan konflik, dan reformasi sektor keamanan. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN).

Sebelumnya, Dr. Syarif menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia periode 2015-2019. Sebelum bergabung dengan KPK, Dr. Syarif adalah Dosen Senior di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Ia juga sebelumnya bekerja di salah satu pusat penelitian dan pengajaran hukum lingkungan terkemuka di Australia yaitu *Australian Centre for Climate and Environmental Law*.

“

PILIHAN MODEL EKONOMI DAN KEBIJAKAN IKLIM YANG DIAMBIL SAAT INI AKAN MENENTUKAN NASIB DAN KESEJAHTERAAN GENERASI INTRA DAN MASA DEPAN KITA. KITA SEMUA MEMILIKI KESEMPATAN DAN PERAN YANG UNIK UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN YANG TEPAT DALAM MENANGANI PERUBAHAN IKLIM. BEKERJA SAMA MENUJU PILIHAN KEBIJAKAN YANG TEPAT UNTUK MEMASTIKAN KEBERLANJUTAN PLANET BUMI AGAR BERTAHAN TERHADAP BENCANA IKLIM, AKAN MEMBAWA DAMPAK YANG LEBIH BESAR BAGI SEMUA ORANG, TERUTAMA BAGI GENERASI MASA DEPAN KITA.

Laode Muhammad Syarif
Executive Director, Kemitraan



Seorang Ibu dari masyarakat Adat Ammatoa Kajang sedang menenun kain





Nadia Hadad

**Executive Director
Madani**

Nadia Hadad adalah Direktur Eksekutif dan salah satu pendiri Yayasan Madani Berkelanjutan. Ia sebelumnya bekerja dengan *Bank Information Center (BIC)* dan Forum LSM Pembangunan Indonesia (*NGO Forum on Indonesian Development / INFID*).

“

DALAM DASAWARSA YANG TIDAK HANYA AKAN MENENTUKAN MASA DEPAN KITA, TETAPI JUGA MASA DEPAN ANAK-ANAK KITA, KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, KOMUNITAS, DAN SEKTOR SWASTA DALAM MENANGANI KRISIS IKLIM SEHARUSNYA TIDAK HANYA DALAM BEBERAPA TINDAKAN TERBAIK, TAPI HARUS MENJADI NORMA KEHIDUPAN.

KAMI PERCAYA BAHWA MENDUKUNG KOMUNITAS-KOMUNITAS DI LAPANGAN DENGAN KEPEMILIKAN YANG AMAN DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA HUTAN DAN MENDUKUNG MEREKA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN TERHADAP RISIKO-RISIKO IKLIM HARUS MENJADI TEMA UTAMA DALAM STRATEGI AKSI IKLIM INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA.

Nadia Hadad

Executive Director, Madani



Ibu Dewi dari Nagari Sirukam sedang memanen kopi



KEPEMIMPINAN MASYARAKAT

Perhutanan Sosial: Inisiatif di Tingkat Tapak yang Berkontribusi Pada Implementasi NDC

Iklim akan terus berubah bahkan ketika kita berupaya mengurangi emisi. Beberapa perubahan alami juga akan membawa efek yang menghancurkan. Karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memastikan bahwa inisiatif-inisiatif meredam laju perubahan iklim yang ekstrim juga mencapai kalangan akar rumput.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal berada di garis terdepan, sebagai yang paling terdampak, dalam menghadapi perubahan iklim. Keadilan akan terwujud jika solusi-solusi perubahan iklim juga dimulai dari akar rumput, ketika komunitas lokal memiliki opsi dan kapasitas memilih langkah adaptasi mengurangi dampak perubahan iklim.

Di Indonesia, Perhutanan Sosial merupakan salah satu inisiatif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat aksi iklim. Dengan memastikan kepemimpinan tumbuh dan menguat di level tapak, ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim ditempa dan menjadi salah satu kekuatan dalam penerapan Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial membuka perbaikan pilihan mata pencaharian masyarakat, sekaligus memastikan ketahanan pangan dan melindungi alam. Perhutanan Sosial, dengan dukungan organisasi masyarakat sipil, adalah skema pemberdayaan masyarakat yang mendukung implementasi efektif dari perencanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Indonesia.

Perhutanan Sosial berpotensi tinggi dalam upaya kolaboratif untuk mencapai target NDC (*Nationally Determined Contribution*). Penelitian MADANI berjudul “Kontribusi Perhutanan Sosial pada Pencapaian NDC Indonesia, Studi Kasus dari KPH Bukit Barisan,” menunjukkan potensi kontribusi Perhutanan Sosial dalam menurunkan emisi hingga 34,6% dari target NDC Indonesia melalui upaya pengurangan deforestasi. Syaratnya, skema perhutanan sosial diterapkan di berbagai wilayah dengan indeks risiko emisi tinggi.



Selfi Sutriani

Perwakilan Perempuan dari Komunitas Nagari Sirukam

Selfi Sutriani, perempuan muda yang bekerja sebagai pegawai pemerintah di Nagari Sirukam, Sumatera Barat. Dia aktif terlibat dalam kegiatan pengembangan sosial dan lingkungan di Nagari Sirukam, khususnya membangun sistem basis data untuk mendukung implementasi ProKlim di areal perhutanan sosial di Nagari Sirukam.

KASUS SATU **NAGARI SIRUKAM**

*Program Kampung Iklim (ProKlim)
di areal Perhutanan Sosial*

Sirukam, sebuah nagari di perbukitan sejuk di Kecamatan Payuang Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Telah berbilang generasi, masyarakat Sirukam merawat pengetahuan lokal dalam perencanaan dan penggunaan lahan secara berkelanjutan.

Pada 2014, Sirukam meraih status perhutanan sosial untuk hutan lindung seluas 1.789 hektare. Namun, ada sebelas hektare area lahan kritis di sekitar hutan Nagari Sirukam yang perlu dipulihkan fungsinya.

Bekerja sama dengan Madani dan KKI-Warsi, masyarakat Nagari Sirukam menjalankan inisiatif Program Kampung Iklim (ProKlim) berbasis perhutanan sosial untuk memulihkan lahan kritis tersebut dan mengelola lingkungan yang rendah karbon. Caranya, dengan menerapkan budidaya perkebunan kopi organik, pengelolaan dan pemanfaatan limbah organik, dan pengembangan data terpadu sebagai bekal nagari merancang perencanaan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon.

Sinergi dan kolaborasi tumbuh di Nagari Sirukam sampai di level tapak. Seperti bunga, kolaborasi tumbuh mekar di lingkungan yang mendukung.

Berbagai pemangku kepentingan lokal, yakni Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sirukam, pemerintah daerah, Kerapatan Adat Nagari (KAN), kelompok perempuan, dan tokoh masyarakat bekerja bersama-sama. Kolaborasi yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan penghidupan masyarakat berdasarkan potensi sumber daya lokal Nagari Sirukam.

Kolaborasi di level tapak inilah yang perlu kita dorong bersama untuk menyalakan lampu-lampu harapan tentang kontribusi masyarakat dalam pengurangan emisi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Menerapkannya pada daerah lain akan menciptakan titik-titik yang saling tersambung, menerangi seluruh Indonesia.





Ramlah

Perempuan Pemimpin Komunitas Ammatoa Kajang

Ramlah, 28 tahun. Dialah sosok perempuan di Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang teguh mengawal hutan adat.

Ramlah, putri seorang Ammatoa atau pemimpin adat. Di tengah budaya patriarki yang kental dan kerap mengabaikan perempuan, Ramlah berjuang. Dia mengambil bagian dalam banyak inisiatif dan kegiatan pemberdayaan sosial serta ekonomi masyarakat dalam melestarikan lingkungan dan melindungi hutan.

Berbekal pengetahuan, pemahaman akan kearifan lokal yang kerap diwariskan oleh para perempuan, Ramlah menampilkan kepemimpinan. Ramlah, sebagai ketua kelompok perempuan, memobilisasi dan memotivasi kelompok-kelompok perempuan di masyarakat Kajang, berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam melindungi hutan.

Representasi pentingnya keterlibatan perempuan dalam perubahan iklim, bersama kelompok perempuan di Kajang, Ramlah berjuang tanpa lelah dalam memperkuat dan merevitalisasi pengetahuan lokal berbasis hak dan kesetaraan gender.

KASUS DUA


AMMATOA KAJANG

Kisah kepemimpinan masyarakat hutan dataran tinggi.

Masyarakat Ammatoa Kajang telah lama mendiami kawasan hutan adat seluas 314 hektare di Kabupaten Bulukumba. Lebih dari 5.000 orang tinggal di desa adat, yakni Tana Toa, Pattiorang, Bonto Aji, dan Malleleng, yang mempraktikkan adat dan budaya adat Kajang.

Passang, itulah istilah hukum adat Ammatoa Kajang yang merujuk pada upaya menjaga dan melestarikan hutan. Hutan dianggap sebagai media transendensi, penyambung antara kehidupan saat ini dan kehidupan setelah kematian. Menghancurkan hutan (*ammanraki borong*) adalah tindakan terlarang dengan sanksi adat bagi mereka yang melakukannya.

Setiap tahun, masyarakat Kajang menggelar '*andangingi*', yakni upacara adat dan ritual untuk menenangkan alam semesta dan seluruh elemennya. Warga berdoa untuk keselamatan ibu alam dan segenap makhluk. *Andangingi*, sebuah tradisi lama yang menjadi salah satu langkah kunci dalam mencegah dampak perubahan iklim.



Pada 2016, masyarakat adat Kajang mendapat pengakuan dari Pemerintah Indonesia atas status hukum mereka sebagai masyarakat adat (MHA) dan hak pengelolaan hutan adat (Hutan Adat). Sebuah perjalanan panjang dan wujud kerja kolaborasi di level tapak. Warga adat, berbagai kelompok CSO, pemerintah daerah, difasilitasi Kemitraan, bekerja bersama hingga terwujudnya status Hutan Adat Ammatoa Kajang.

Status hutan adat telah membuat masyarakat Adat Kajang lebih solid dan percaya diri. Mereka merawat, memupuk, dan melanjutkan kearifan tradisional dalam mengelola hutan secara lestari. Sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas dan ekonomi produktif juga bergulir, antara lain membuka akses pasar untuk kain tenun dan memperkenalkan ekowisata yang digerakkan beberapa kelompok pemuda.

Ketahanan masyarakat yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim meningkatkan akses dan peluang-peluang mereka terhadap penghidupan lebih baik dan berkelanjutan. Masyarakat yang tangguh juga berkesempatan yang lebih baik untuk beradaptasi dan hidup berdampingan dengan perubahan iklim di masa depan

KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH

Memfasilitasi Aksi Berbagai Pemangku Kepentingan

Pemerintah daerah seringkali menjadi pihak pertama yang menerima dan merespon dampak perubahan iklim dalam skala lokal. Merekalah perwakilan pemerintah pusat yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah adalah pihak yang memahami pengetahuan lokal dan praktik terbaik untuk mengenali potensi kontribusi terhadap langkah-langkah adaptasi dan mitigasi. Karenanya, kepemimpinan pemerintah daerah amat penting dalam memastikan masuknya perspektif perubahan iklim banyak pemangku kepentingan.

Bagaimana sebuah daerah menanggapi peluang dan tantangan yang akan muncul bersama perubahan iklim kerap kali tergantung pada pemimpin daerah. Prioritas, rencana, dan tindakan dirancang bersama di level daerah. Bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam membangun kapasitas dan membuat negara semakin tangguh terhadap perubahan iklim.



Prof. Nelson Pomalingo

Bupati Gorontalo

Prof. Nelson Pomalingo adalah Bupati Gorontalo yang menjabat dua periode 2016-2024. Nelson adalah bupati dengan komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pada 2019, ia terpilih sebagai Ketua Program Bisnis Berkelanjutan di Lingkar Temu Kabupaten Lestari, sebuah asosiasi pemerintah kabupaten yang mendorong pembangunan berkelanjutan.

Nelson Pomalingo memimpin beberapa inisiatif demi mewujudkan kabupaten lestari. Antara lain, menyelenggarakan *Masterclass* untuk Investasi Berkelanjutan, mendukung anggota kabupaten untuk menarik investasi, serta merancang indeks “Kerangka Daya Saing Regional” sebagai alat pelaporan sukarela.

KASUS KETIGA

KABUPATEN GORONTALO

*upaya-upaya kolaboratif untuk
memperbaiki akses pendanaan inovatif*

Gorontalo adalah kabupaten yang konsisten mengintegrasikan prioritas perubahan iklim. Sejak 2017, wilayah ini telah memasukkan perspektif iklim dalam rencana pembangunan maupun penganggaran. Langkah inovatif ini membuat Gorontalo menjadi daerah percontohan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan untuk memperkuat skema pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, pada 2019-2020.

Kabupaten Gorontalo, dalam rangkaian *Masterclass* untuk Investasi Berkelanjutan yang diprakarsai oleh Prof. Nelson, konsisten melibatkan lintas pemangku kepentingan. Target pembangunan berkelanjutan, tonggak-tonggak capaian, serta kontribusi ditetapkan bersama para pemangku kepentingan. Saat ini, Gorontalo sedang dalam proses mengajukan proposal lintas pemangku kepentingan kepada *Green Climate Fund* (GCF) tentang pertanian berkelanjutan yang terintegrasi. Industri yang berbasis masyarakat dan memiliki nilai tambah diharapkan menjadi tulang punggung pertanian yang terintegrasi ini

KEPEMIMPINAN SWASTA

Pelaku Usaha Sosial dan Ramah Lingkungan yang Inovatif

Upaya keluar dari jebakan pola pembangunan konvensional dan berbasis bahan bakar fosil menuntut perubahan signifikan di berbagai rantai keuangan. Sebuah ikhtiar yang tak mudah, terutama dalam situasi ketika negara sedang fokus membangun kembali ekonomi dari pandemi COVID-19.

Mewujudkan iklim usaha sosial dan ramah lingkungan karenanya membutuhkan terobosan pendanaan. Sektor keuangan publik di Indonesia pun sebenarnya mulai bergerak secara bertahap ke ekonomi yang lebih hijau dan lebih tahan iklim. Kondisi ini membutuhkan percepatan, juga dukungan intensif dan skala lebih besar, agar sektor keuangan swasta bisa memasukkan pertimbangan iklim secara lebih serius.

Pertimbangan iklim adalah unsur tak terelakkan bagi dunia bisnis. Dengan memahami risiko dan tantangan perubahan iklim, perusahaan akan berpeluang lebih baik untuk mengatasi berbagai krisis iklim. Di masa depan, perusahaan akan lebih berpotensi mendapat keuntungan saat praktik-praktik bisnis dijalankan selaras dengan prinsip bersih nol emisi.

Saat ini juga telah tumbuh generasi baru pelaku-pelaku usaha yang aktif merespons tuntutan rendah emisi. Hal ini jelas akan mendorong tren rantai pasokan yang berkelanjutan dan berorientasi pada dampak. Berbagai peluang baru dan berada di luar batasan konvensional dapat diciptakan agar dampak-dampak positif yang akan mendukung upaya bersama mencapai tujuan iklim nasional maupun global dapat tercapai.



Hanna Keraf

- **Du Anyam, Co-Founder/Kepala Pengembangan & Kemitraan Masyarakat**
- **Krealogi, Co-Founder/Kepala Pengembangan & Kemitraan Masyarakat**

Hanna Keraf, salah satu pendiri Du'anyam. Sebuah perusahaan sosial yang bertujuan memberdayakan perempuan melalui kerajinan anyaman.

Hanna memimpin Tim Pengembangan Masyarakat DuAnyam. Mereka bergerak ke Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, Hannah bertemu, berdialog, dan “menganyam” hari depan bersama para perempuan. Sejauh ini, ada 1.400 perempuan yang bergandeng tangan bersama Du'Anyam, jumlah yang diharapkan terus bertambah.

Hannah merancang strategi program berbasis masyarakat dan secara khusus merangkul perempuan. DuAnyam mengawasi perluasan dan peningkatan produksi di tingkat masyarakat.

Di Krealogi, Hannah memimpin tim kemitraan. Tugas tim ini adalah menjalin jejaring dan kerja sama dengan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di berbagai wilayah. Saat ini telah lebih dari 15.000 UMKM bergerak bersama Krealogi. Melalui berbagai pelatihan virtual dan platform digital terpadu, Krealogi berusaha meningkatkan dan memecahkan hambatan dalam rantai pasokan UMKM.

KASUS KEEMPAT | perusahaan sosial dan ramah lingkungan yang inovatif

DUANYAM x KREALOGI

DuAnyam didirikan untuk mempromosikan budaya kerajinan anyaman yang unik dari seniman perempuan dan membantu mereka mendapatkan kemandirian finansial. Berbagai riset menunjukkan, ketika perempuan memiliki kemandirian finansial maka mereka lebih cenderung fokus pada makanan bergizi, perawatan kesehatan, dan pendidikan --yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Lebih dari 50 desa terpencil dari seluruh Indonesia telah bergabung dengan Du'anyam. Berjejaring dengan DuAnyam telah mampu meningkatkan 40% pendapatan para pengrajin yang bergabung. Produk yang dikembangkan masyarakat bersama DuAnyam telah

memenangkan berbagai penghargaan, antara lain *Good Design Awards* 2020, *Bangga Buatan Indonesia Awards* 2020, dan terpilih sebagai official merchandise *Asian Games* 2018. Hingga saat ini, perusahaan ini telah berkembang untuk melayani 300 klien korporat dan hotel global dalam lima tahun terakhir.

Selama beberapa tahun terakhir, Du'anyam mendukung komunitas yang berada di lahan gambut dan di sekitar hutan. Bersama-sama masyarakat, DuAnyam menciptakan kerajinan berbasis komoditas lokal yang berkelanjutan sebagai model bisnis baru untuk mempromosikan pentingnya upaya konservasi. Produk unggulan DuAnyam, antara lain anyaman rumput purun dari Kalimantan Selatan dan kulit pohon waru dari Papua.

Mereka juga membangun Krealogi - sebuah platform rantai pasokan digital untuk produk kerajinan. Melalui platform ini, Krealogi memfasilitasi proses digitalisasi manajemen pesanan, perencanaan produk, manajemen inventaris, dan pelacakan biaya. Krealogi telah bekerja sama dengan berbagai kabupaten, antara lain Sintang di Kalimantan Barat dan Siak di Riau, untuk mendukung komunitas dan perusahaan lokal dalam mengelola rantai pasokan produk yang berkelanjutan.

KEPEMIMPINAN GENERASI PENERUS

Tindakan Hari Ini, Untuk Masa Depan yang Lebih Cerah

Perjuangan melawan laju perubahan iklim adalah upaya yang harus dilakukan secara terus-menerus. Upaya yang akan menentukan seberapa lebih cerah (atau lebih gelap) masa depan nantinya. Kalangan milenial, generasi z, merekalah yang akan hidup di dunia apa pun yang kita ciptakan hari ini untuk tahun 2050 dan seterusnya.

Tidak ada jalur pembangunan yang layak untuk mengamankan dunia tanpa krisis iklim yang tidak melibatkan peran generasi muda. Semua negara, termasuk Indonesia, wajib merencanakan dan mengimplementasikan strategi pembangunan dengan melibatkan generasi muda.

Saat ini, sangatlah penting untuk memberikan ruang bagi para pemimpin generasi berikutnya. Bersama generasi muda, kita menata masa depan yang efektif, efisien, lebih berkelanjutan, serta tahan iklim dalam proses kebijakan dan implementasi NDC.



Hiasintus Restu Krisnanda

Dusun Silit - Kalimantan Barat

Hiasintus Restu Krisnanda adalah tokoh pemuda dari Dusun Silit, Desa Nanga Pari, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bersama rekan-rekan mudanya, ia aktif mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat.

Desa Silit dihuni masyarakat adat Dayak Seberuang. Mereka mengelola hutan secara lestari dengan berpedoman pada prinsip kearifan lokal warisan nenek moyang. Hutan yang lestari membuat air berlimpah dan menggerakkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sumber energi yang dibangun dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Bersama WALHI Kalimantan Barat, masyarakat Dayak Seberuang di Dusun Silit memperjuangkan pengakuan hutan adat seluas 5.272 hektar. Pada September 2020, mereka mendapat SK pengakuan dan perlindungan dari pemerintah daerah Sintang.





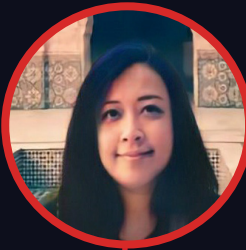
Syaharani

Jeda Iklim/ICEL

Syaharani adalah salah satu anak muda yang peduli terhadap krisis iklim. Saat ini ia aktif mengkampanyekan, mengorganisir, dan mengajak generasinya untuk bertindak bagi kebijakan iklim yang lebih ambisius melalui koalisi Jeda Iklim dan *Extinction Rebelión*.

Ia juga anggota tim peneliti kesenjangan kebijakan iklim Indonesia dalam perspektif antargenerasi yang diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada tahun 2020. Saat ini, ia bekerja sebagai peneliti hukum dan kebijakan dengan fokus pada krisis iklim. Ia bermimpi untuk meluaskan akses keadilan dan akses untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan iklim bagi masyarakat yang terkena dampak krisis iklim.





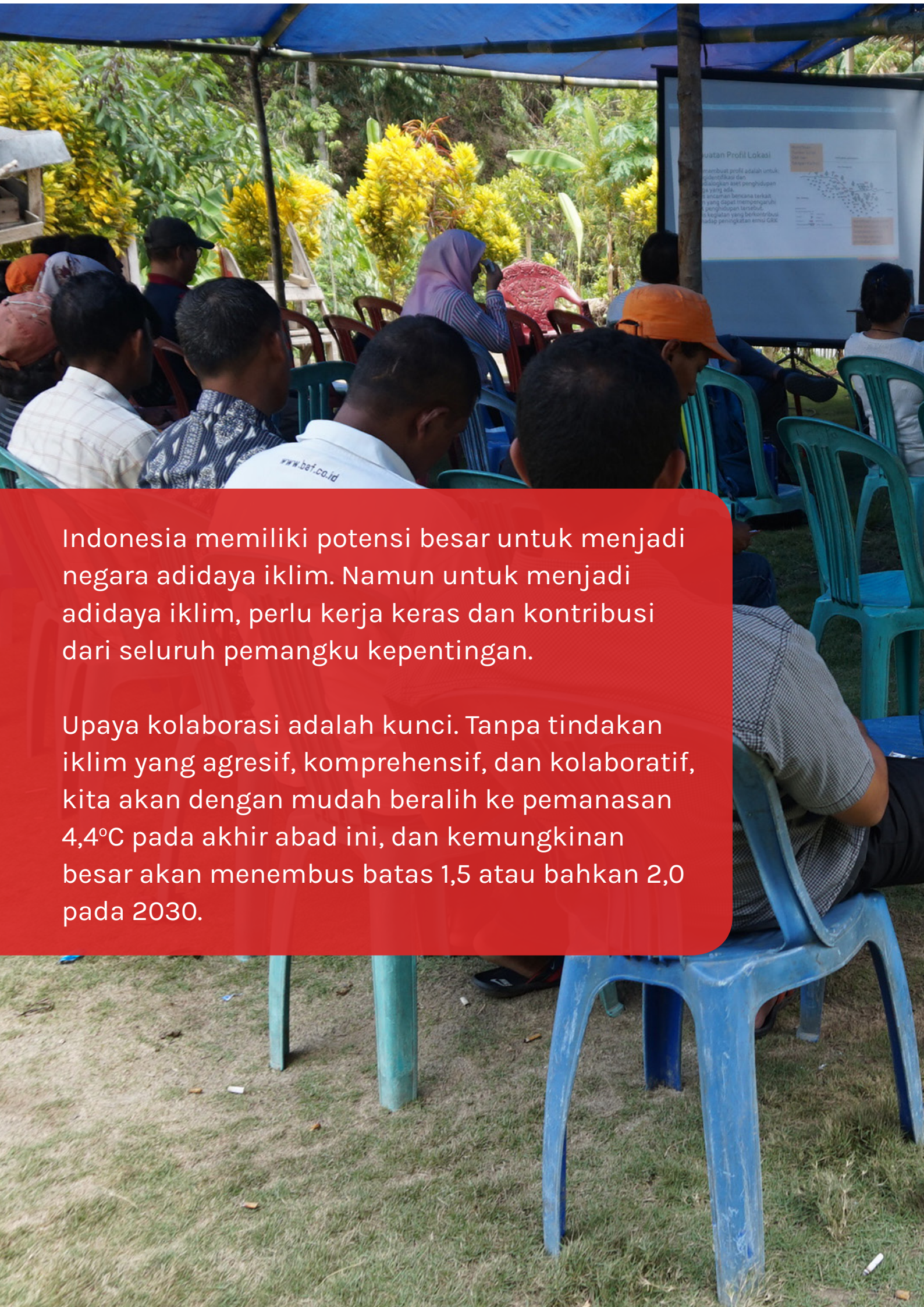
Eka Melisa

Eka Melisa adalah seorang ahli iklim dan pembangunan dengan pengalaman 20 tahun dalam isu-isu perubahan iklim, baik kebijakan maupun implementasi. Ia telah bekerja di dalam dan dengan berbagai pemangku kepentingan: mulai dari Pemerintah Indonesia, LSM hingga swasta, termasuk sebagai negosiator utama Indonesia di UNFCCC, bilateral, dan berbagai forum lain.

“

SAYA TELAH MELIHAT DAN TERLIBAT DALAM BERBAGAI PENDEKATAN TERHADAP BAGAIMANA CARA MENGATASI DAN MERESPON PERUBAHAN IKLIM. NAMUN, TIDAK SATUPUN PENDEKATAN TERSEBUT YANG EFEKTIF TANPA KEMITRAAN DAN NIAT BAIK DARI SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT, BAIK AKTOR PEMERINTAH MAUPUN NON PEMERINTAH

Eka Melisa



Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara adidaya iklim. Namun untuk menjadi adidaya iklim, perlu kerja keras dan kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan.

Upaya kolaborasi adalah kunci. Tanpa tindakan iklim yang agresif, komprehensif, dan kolaboratif, kita akan dengan mudah beralih ke pemanasan 4,4°C pada akhir abad ini, dan kemungkinan besar akan menembus batas 1,5 atau bahkan 2,0 pada 2030.

**SEKRETARIS JENDERAL PBB MEMPERINGATKAN KITA
BAHWA ARAH PEMANASAN DUNIA ADALAH
'KODE MERAH UNTUK KEMANUSIAAN'.**



António Guterres

Secretary-General of the
United Nations

“

**KITA SUDAH BERADA DI 1,2
DERAJAT DAN ANGKA INI TERUS
NAIK. PEMANASAN TELAH
MENINGKAT CEPAT DALAM
BEBERAPA DEKADE TERAKHIR.
SETIAP FRAKSI DARI TIAP
DERAJAT ADALAH PENTING.
KONSENTRASI GAS RUMAH
KACA TERUS MENCATATKAN**

**REKOR YANG BERBEDA. BENCANA CUACA DAN IKLIM
EKSTREM SEMAKIN MENINGKAT DALAM FREKUENSI DAN
INTENSITAS. ITULAH MENGAPA KONFERENSI IKLIM PBB
TAHUN INI DI GLASGOW SANGAT PENTING.**

**JIKA KITA MENGGABUNGAN KEKUATAN BERSAMA
SEKARANG, KITA DAPAT MENCEGAH BENCANA IKLIM.
TIDAK ADA WAKTU UNTUK PENUNDAAN DAN TIDAK ADA
RUANG UNTUK ALASAN-ALASAN. SAYA MENGANDALKAN
PARA PEMIMPIN PEMERINTAH DAN SEMUA PEMANGKU
KEPENTINGAN UNTUK MEMASTIKAN COP26 SUKSES.**

A young child with dark hair, wearing a green and yellow striped shirt and light blue shorts, is sitting on a wooden structure. The child is holding a horizontal wooden beam with their right hand. The structure is made of rough, natural wood. In the background, there are more wooden beams and a white wall. The ground is dirt with some rocks and sparse vegetation.

“

KAMI PERCAYA BAHWA DENGAN KOLABORASI DAN KEMITRAAN ANTARA PARA AKTOR PEMERINTAH DAN NONPEMERINTAH, KITA HARUS DAPAT MENGHINDARI BENCANA IKLIM. BERSAMA-SAMA, BERGANDENGAN TANGAN, DAN MELALUI KOLABORASI HOLISTIK, MARI BAWA INOVASI- INOVASI DAN BERAGAM SOLUSI UNTUK MEWUJUDKAN DUNIA TANPA KRISIS IKLIM, MELALUI INDONESIA YANG LEBIH BAIK, BERKELANJUTAN, ADIL, DAN KUAT.





**JANGAN TINGGALKAN SIAPAPUN DI BELAKANG,
JADILAH ADIKUASA IKLIM.**

#TIMEFORACTIONINDONESIA